

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) DALAM
MEMBERIKAN LAYANAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN DI
SMP ISLAM IBNURUSYD KECAMATAN LAMPUNG UTARA**

Oleh

Syafri Arti, Irawan Suntoro, Sulton Djasmi

FKIP Unila: Jl. Prof.Dr.Soemantri Brojonegoro No.1, Gedung Meneng

E-Mail: syafri.arti.mp5@gmail.com

HP.:-

Abstract: Poor Student Aid Policy Implementation (BSM) Provide Services In Education For Poor Students In Islamic Junior Ibnurusyd District North Lampung. The purpose of the study (1) Determine and analyze the access to educational services for poor students in junior Islam Ibnurusyd Kotabumi North Lampung. (2) Determine strategies to prevent school drop-out rates for poor students. (3) Knowing how to meet the needs of poor students in learning. (4) Knowing the constraints in implementing BSM. (5) Knowing the BSM fund management conducted by parents and students. This study used a qualitative method with a case study approach. The data collection is interview, observation and documentation. Data analysis techniques are, among others, reduction, data display and conclusion. Results of the study: (1) access educational services for poor students in junior Islam Ibnurusyd Kotabumi North Lampung is in conformity with the provisions ditetapkan. Based on the survey results revealed that the SMP Islam Ibn Rushd Kotabumi always strive to provide the information and services more accessible to students who received the BSM. (2) Strategies to prevent school drop-out rates for poor students who carried out by Islamic Junior Ibnurusyd Kotabumi is in conformity with the Constitution. Based on the research result shows that the strategy is to prevent the dropout rate for students in North Lampung miskin are as follows: (a) Reducing the burden of expenditure of parents (b) synergize policies and programs BSM. (3) Based on the research strategies and ways to meet the needs of poor students in junior Islam Ibn Rushd Kotabumi North Lampung that can still continue their education are, among others: (a) the purchase of books and stationery. (B) clothing / uniforms and school supplies (c) Financing transport to school. (4) As for some of the obstacles encountered during the implementation of the BSM program policy is as follows: (a) lack of government funds BSM given to the school. (B) Disbursement of funds BSM is not timely (c) Less pahamiannya parents in fund management BSM. (5) Management BSM fund fully managed by the parents not because of school funding BSM not shown to students for the school, based on the survey results revealed that the management of funds by parents and their children are not involved in managing the children tend to be apathetic in the BSM fund management cenerung child does not want to know whether the funds are in store for the next school needs or for the needs of everyday life.

Keywords: help poor students, policy implementation, education services

Abstrak: Tujuan penelitian (1) Mengetahui dan menganalisis akses pelayanan pendidikan bagi siswa miskin di SMP Islam Ibnurusyd Kotabumi Lampung Utara. (2) Mengetahui strategi dalam mencegah angka putus sekolah bagi siswa miskin. (3) Mengetahui cara dalam memenuhi kebutuhan siswa miskin dalam pembelajaran. (4)

Mengetahui kendala-kendala dalam mengimplementasikan BSM. (5) Mengetahui pengelolaan dana BSM yang dilakukan oleh orang tua dan siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah antara lain reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian: (1) Akses pelayanan pendidikan bagi siswa miskin di SMP Islam Ibnurusyd Kotabumi Lampung Utara sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi selalu berusaha memberikan informasi dan akses pelayanan kepada siswa penerima BSM. (2) Strategi dalam mencegah angka putus sekolah bagi siswa miskin yang dilakukan oleh SMP Islam Ibnurusyd Kotabumi sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi yang dilakukan untuk mencegah angka putus sekolah bagi siswa miskin di Lampung Utara adalah sebagai berikut: (a) Mengurangi beban pengeluaran orang tua siswa (b) Mensinergikan kebijakan dan program BSM. (3) Berdasarkan hasil penelitian strategi dan cara untuk memenuhi kebutuhan siswa miskin di SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya adalah, antara lain: (a) Pembelian buku dan alat tulis. (b) Pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah (c) Pembiayaan transportasi ke sekolah. (4) Adapun beberapa kendala yang dihadapi pada waktu pelaksanaan kebijakan program BSM tersebut adalah sebagai berikut: (a) Minimnya dana BSM yang diberikan pemerintah ke sekolah. (b) Pencairan dana BSM tidak tepat waktu (c) Kurang pahamiannya orang tua siswa dalam pengelolaan dana BSM. (5) Pengelolaan dana BSM sepenuhnya dikelola oleh orang tua siswa bukan sekolah dikarenakan dana BSM ditunjukkan untuk siswa bukan untuk sekolah, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan dana oleh orang tua serta tidak melibatkan anaknya dalam melakukan pengelolaan maka anak cenderung apatis dalam pengelolaan dana BSM tersebut anak cenderung tidak mau tahu apakah dana tersebut di simpan untuk kebutuhan sekolah selanjutnya atautkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Kata kunci: bantuan siswa miskin, implementasi kebijakan, layanan pendidikan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu. Sebagai implementasi dari UU tersebut pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dalam pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa pendanaan pendidikan mejadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan peraturan tersebut dalam rangka pemerataan pendidikan

khususnya memberikan kesempatan kepada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat tetap bersekolah, pemerintah melalui Kementerian Agama RI memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Kebijakan pemerintah pada pelaksanaan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) sebagai upaya percepatan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun belum sepenuhnya menajamin seluruh masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin. Program BOS yang telah dilaksanakan ternyata hanya

mampu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus dikeluarkan masyarakat, tetapi tidak mampu untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan. Dalam kenyataannya, masih banyak siswa miskin yang tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikannya karena harus mengeluarkan biaya individu berupa biaya transportasi, seragam, sepatu, buku tulis atau biaya lainnya yang tidak dapat dipenuhi dari dana BOS.

Perbedaan antara BOS dan BSM yaitu BOS merupakan biaya untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka menuntaskan wajib belajar Sembilan tahun. BSM yaitu biaya untuk membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah.

Program BSM adalah program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah.

Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) yakni dengan mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa.

Carl J Federick dalam Agustino (2008:7), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Winarno (2007:15) istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada "kebijakan luar negeri Indonesia", "kebijakan ekonomi Jepang" dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Wahab maupun Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.

Sedangkan menurut Irfan Islamy dalam Suharno, (2009:12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan

yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan, pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya.

Menurut Hutt dan Speh dalam Danim, (2003:47) layanan pendidikan terdiri dari tiga dimensi atau komponen utama, yaitu:

1. *Technical quality* (kualitas teknis)
Komponen yang berkaitan dengan kualitas *output* yang diterima oleh peserta didik, dapat diperinci lagi menjadi:
 - a. *Search quality* (kualitas pencarian) yaitu layanan pendidikan yang dapat dievaluasi oleh peserta didik
 - b. *Experience quality* (kualitas pengalaman) yaitu layanan pendidikan yang hanya bisa dievaluasi peserta didik setelah menggunakan jasa atau produk
 - c. *Credence quality* (kualitas kepercayaan) yaitu sesuatu yang sukar dievaluasi peserta didik meskipun telah mengkonsumsi suatu jasa.
2. *Functional quality* (kualitas fungsional)
Yaitu komponen yang berkaitan dengan layanan pendidikan cara penyampaian suatu jasa.
3. *Corporate quality* (kualitas institusi)
Yaitu profit, reputasi, citra umum dan daya tarik khusus suatu institusi pendidikan.

Menurut Purwoko, (2008:52) penyajian informasi layanan pendidikan ialah kegiatan membantu siswa dalam mengenali lingkungannya, terutama tentang kesempatan-kesempatan yang ada didalamnya yang dapat dimanfaatkan siswa baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Penyajian informasi layanan pendidikan itu dimaksudkan untuk memberikan

wawasan kepada para siswa sehingga ia dapat menggunakan informasi itu baik untuk mencegah atau mengatasi kesulitan yang dihadapinya, serta untuk merencanakan masa depan, perencanaan kehidupan ini mencakup, kehidupan dalam studinya, dalam pekerjaannya, maupun dalam membina keluarga.

Menurut Prayitno dan Amti, (2004:261-268) pada dasarnya jenis dan jumlah informasi layanan tidak terbatas namun, khususnya dalam rangka pelayanan pendidikan hanya akan dibicarakan tiga jenis informasi, yaitu (a) informasi pendidikan, (b) informasi pekerjaan, (c) informasi sosial budaya.

METODE

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Hancock, et.al, (2006) penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan menurut obyek yang disebut sebagai kasus yang dilakukan secara seutuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian studi kasus adalah penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menuntut kehadiran peneliti di lapangan, karena penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri dan ia harus berinteraksi mendalam dengan sumber data. Menurut Lofland dan Lofland (dalam Sugiono, 2008:402) sebagaimana yang bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data

hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama, data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber/informan atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Sumber data primer ditentukan secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang bersifat tidak acak dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu
2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data. Data-data dan informasi yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini ada bermacam-macam bentuk dan karakteristik yang masing-masing membutuhkan teknik yang berada dalam proses pengumpulan dan analisisnya. Selanjutnya data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis menurut jenis dan teknik yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian studi kasus ini dikumpulkan melalui pendekatan diskriptif dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara, pengamatan atau observasi dan studi dokumentasi, ketiga teknik pengumpulan data tersebut digunakan

dalam penelitian ini namun diutamakan menggunakan teknik wawancara mendalam karena dapat mengungkap makna yang tersembunyi dibalik fenomena.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dalam model analisis ini tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai sebuah proses siklus.

Menurut Patton, (2006:28) bahwa suatu penyajian merupakan kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sedangkan kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi peneliti harus memberikan kesimpulan secara longgar, terbuka dan skeptis.

Pengecekan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus mampu mendemostrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Menurut Moleong, (2007:76) keempat kriteria tersebut adalah (1) derajat kepercayaan (*credibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) Ketergantungan (*dependability*) dan (4) kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara

Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh

akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah.

Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal.

Akses Pelayanan Pendidikan Bagi Siswa Miskin di SMP Islam Ibnurusyd

1. Para siswa dapat mengorientasikan dirinya dalam mencari informasi terutama untuk kehidupannya

Peningkatan akses dan mutu pendidikan kepada masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat membangun dan memajukan bangsa dan negara agar tercapai masyarakat yang berilmu, cerdas dan berkarakter pembangunan dibidang pendidikan merupakan investasi besar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Penetapan sasaran program BSM, dari yang semula melalui sekolah, telah diubah menjadi penetapan sasaran berbasis rumah tangga melalui pemberian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan. Selanjutnya rumah tangga

yang memiliki anak-anak berusia sekolah, dapat membawa KPS tersebut ke sekolah untuk dicalonkan sebagai penerima manfaat program BSM. Kartu ini diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima program BSM agar menjangkau anak-anak sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan sesuai kuota dan anggaran yang tersedia.

Sekolah SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara selalu berusaha memberikan bantuan dan akses pelayanan secara optimal kepada seluruh siswa/siswinya yang mendapatkan bantuan BSM dari program pemerintah tersebut, mulai dari kepala sekolah sampai dengan guru terjun langsung memberikan bantuan dan akses pelayanan kepada siswa/siswi penerima bantuan BSM dengan tujuan siswa/siswi yang tidak mampu betul-betul dapat bantuan BSM sehingga kebutuhan siswa dapat terakomodir dengan baik. Adapun ketentuan dan syarat-syarat untuk mendapatkan BSM adalah sebagai berikut:

- a. Membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) ke sekolah untuk didaftar sebagai calon penerima Program BSM dengan disertai salah satu bukti tambahan berikut ini:
 - 1) Kartu keluarga yang nama kepala keluarganya sama dengan nama Kepala Rumah Tangga (KRT) di KPS atau
 - 2) Surat keterangan bahwa anak/siswa berasal dari Rumah Tangga Penerima KPS dari Kepala RT/RW/Dusun
 - 3) Nama kepala keluarga tidak sama dengan KRT di KPS namun alamat di Kartu Keluarga sama dengan alamat di KPS.
- b. Kepala sekolah dapat mencatat calon penerima BSM berdasarkan KPS dan kartu calon penerima BSM

- untuk dimasukkan dalam formulir rekap kartu
- c. Kepala sekolah yang tidak menerima KPS bersama komite sekolah dapat mengusulkan siswa dari keluarga miskin yang tidak menerima KPS untuk dimasukkan ke dalam formulir usulan sekolah, jika jumlah penerima KPS kurang dari kuota kabupaten/kota dengan ketentuan:
 - 1) Orang tua siswa terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
 - 2) Siswa yatim, piatu atau yatim piatu
 - 3) Siswa berasal dari keluarga korban bencana.
 - d. Dinas pendidikan kabupaten/kota menggabungkan seluruh data calon penerima BSM dari seluruh sekolah di wilayahnya.
 - e. Dinas pendidikan kabupaten/kota menyerahkan rekapitulasi data BSM ke Direktorat Pembinaan SD.
 - f. Direktorat pembinaan sekolah dasar direktorat jenderal pendidikan dasar kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan surat keputusan penetapan penerima program BSM sebagai dasar penyaluran dan program BSM tahun pelajaran 2014/2015
 - g. Dana BSM dapat diambil di lembaga penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Siswa bersama orang tua/wali murid membawa kartu identitas dan mengisi slip penarikan tabungan
 - 2) Pengambilan tidak dapat diwakilkan selain oleh pihak yang bersangkutan (sesuai specimen)
 - 3) Dapat diambil alih oleh orang tua/wali murid apabila siswa penerima BSM masih dibawah umur 9 tahun atau belum memiliki KTP.

- 2) Para siswa dapat memilih dengan tepat kesempatan-kesempatan yang ada dalam lingkungannya

Tujuan informasi layanan pendidikan adalah supaya para siswa memperoleh informasi layanan pendidikan yang relevan dalam rangka memilih dan mengambil keputusan secara tepat guna pencapaian pengembangan diri secara optimal dalam selain itu tujuan dari informasi layanan pendidikan adalah membekali siswa dengan berbagai informasi tentang potensi diri sehingga siswa mampu meningkatkan pemahaman potensi diri guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Strategi dalam Mencegah Angka Putus Sekolah Bagi Siswa Miskin

1. Mengurangi beban pengeluaran orang tua siswa

Ekonomi keluarga yang kurang mendukung cenderung timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kegiatan bekerja yang berlebihan oleh anak menyita konsentrasi anak sehingga mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah.

Hasil observasi penelitian diketahuilah bahwa profesi orang tua siswa dan siswi yang bersekolah di SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara yaitu terdiri dari profesi tani dan wiraswasta, dimana penghasilan dari orang tua masih sangat memprihatinkan misalnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani karet akhir-akhir ini semakin kesulitan akibat krisis global. Selain harga barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat

2. Mensinergikan kebijakan dan program bantuan siswa miskin (BSM)

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2014 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan, demi mencapai kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program pemerintah mengenai wajib belajar pendidikan dasar sembilan Tahun masih perlu ditingkatkan mengingat sampai dengan tahun 2014 masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

Melalui kebijakan yang ditunjukkan untuk meningkatkan mutu, maka implementasi kebijakan pencapaian wajib belajar sembilan tahun diharapkan bisa dilakukan tidak hanya dalam rangka mengejar target kuantitas yang ditandai dengan peningkatan angka partisipasi sekolah, melainkan lebih jauh lagi mampu memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar yang sangat diniscayakan setiap warga masyarakat khususnya bagi anak keluarga miskin dan rentang miskin sebagai modal utama untuk bisa mengakases hak-hak hidupnya, sebut pula memberdayakannya.

3. Manfaat adanya BSM

Penyelenggaraan program BSM tidak secara tegas ditentukan apakah BSM untuk subsidi umum atau subsidi khusus yang diarahkan untuk siswa miskin, hasil kajian memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaannya BSM cenderung diperlakukan sebagai subsidi umum untuk membiayai kegiatan siswa miskin dan semua murid menerima manfaat program BSM. Secara konseptual, sekolah memegang kunci dalam penentuan penggunaan BSM termasuk dalam kebijakan pemberian bantuan khusus untuk siswa miskin,

berdasarkan ketentuan (panduan BSM) dana BSM di kelola oleh orang tua siswa. Uang dikirim langsung ke nomor rekening peserta didik oleh BRI sebagai lembaga penyalur yang ditentukan Tim Manajemen Provinsi. Peserta didik boleh menggunakan BSM tersebut dengan berbagai jenis kegiatan baik yang menunjang untuk kebutuhan sekolah maupun di luar kebutuhan sekolah. Namun, hasil kajian yang dilaksanakan oleh peneliti memperlihatkan betapa besar dominasi orang tua siswa dalam penyusunan pengeluaran dana BSM maupun dalam pengelolaan dana BSM hal ini terjadi hampir seluruh siswa yang menerima BSM.

Kendala-Kendala dalam Mengimplementasikan BSM

Pelaksanaan kebijakan program BSM secara umum di SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara sudah dapat berjalan dengan cukup baik, meskipun demikian masih ditemui beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan membutuhkan upaya untuk mengatasinya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi pada waktu pelaksanaan kebijakan program BSM tersebut adalah sebagai berikut:

1. Minimnya dana BSM yang diberikan pemerintah ke sekolah Dana BSM yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk siswa-siswa yang tidak mampu memeng belum mampu mencukupi kebutuhan semua siswa yang miskin dan rentang miskin, ini terlihat dari tidak semua siswa miskin dan rentang miskin mendapatkan dana BSM ini membuktikan bahwa dana untuk BSM tidak mencukupi walupun pemerintah mencanangkan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN. Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan program BSM perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh

dengan tujuan dana BSM dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan mampu mengakomodir siswa-siswa yang tidak mampu sehingga mereka tidak putus sekolah.

2. Pencairan dana BSM tidak tepat waktu

Kebutuhan siswa-siswa tidak mampu yang ada di MP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara memerlukan biaya yang harus segera dicukupi, waktu pelaksanaan kebijakan program BSM pada tahun anggaran 2012 akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan desember 2012, yaitu semester 2 tahun ajaran 2012/2013 dan semester 2 tahun ajaran 2013/2014.

3. Kurang pahamnya orang tua siswa dalam pengelolaan dana BSM

Pandangan masyarakat terhadap kebijakan bantuan dana BSM dari pemerintah ini pada awalnya sangat senang sekali karena membantu seluruh biaya pendidikan, baik operasional maupun non operasional atau pribadi jadi mereka menganggap bahwa dengan adanya bantuan BSM, orang tua sudah tidak membayar semua keperluan di dalam pendidikan anaknya sampai dengan keperluan pribadi siswa seperti seragam sekolah bahkan ada orang tua siswa yang menggunakan dana BSM untuk keperluan sehari-hari. Padahal dana BSM adalah untuk digunakan untuk pembiayaan seluruh kegiatan operasional seperti kebutuhan sekolah seperti pembelian buku, tas, sepatu, seragam, SPP dan lain sebagainya begitu pula untuk biaya penunjang kegiatan belajar mengajar mulai dari pembelian buku referensi dan buku teks pelajaran.

Pengelolaan Dana BSM oleh Orang Tua dan Siswa

1. Dana BSM digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan

Dana BSM yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa miskin dan rentang miskin dikelola sepenuhnya oleh orang tua dan siswa penerima bantuan itu sendiri, sekolah hanya sebatas memfasilitasi mengakomodir kebutuhan siswa dengan tujuan siswa dapat melanjutkan pendidikan hingga lulus dari sekolah tanpa suatu hambatan. Berdasarkan hasil observasi penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa penggunaan dana BSM oleh siswa sepenuhnya di kelola oleh orang tua siswa, orang tua siswa tersebut yang membelanjakan kebutuhan sekolah siswa sehingga banyak dana BSM yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya sendiri.

2. Siswa selalu menggunakan dana sesuai kebutuhan pembelajaran

Pengelolaan dana BSM harus melibatkan siswa dengan tujuan siswa dapat mengetahui dana tersebut digunakan untuk keperluan apa, apakah sesuai atau tidak dengan melibatkan siswa dalam pengelolaan dana BSM maka siswa akan lebih tahu dan bijak dalam menggunakan dana tersebut. Dana BSM merupakan dana bantuan yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah siswa-siswa miskin dan rentang miskin sehingga tidak dibernakan untuk menggunakan dana BSM untuk kebutuhan sehari-hari.

PEMBAHASAN

Akses Pelayanan Pendidikan Bagi Siswa Miskin di SMP Islam Ibnurusyd

Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orang tuanya. Program

BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di kabupaten/kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal. Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa.

Untuk mewujudkan dan menyukseskan program tersebut maka dibutuhkan sebuah akses pelayanan yang prima bagi siswa miskin dan rentang miskin, pelayanan pendidikan merupakan sub sistem pelayanan masyarakat pada era globalisasi, pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membawa perubahan yang berarti bagi bangsa dan negara. Mencermati pelayanan pendidikan, utamanya pelayanan pendidikan untuk siswa dari keluarga pra sejahtera masih mengandung beberapa permasalahan oleh sebab itu agar dapat memberikan yang terbaik, maka diperlukan adanya peningkatan akses pelayanan pendidikan.

Menurut Prayitno dan Amti, (2004:259-260) akses pelayanan pendidikan adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki, dengan demikian akses pelayanan pendidikan sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan aktivitas belajar siswa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara selalu berusaha memberikan informasi dan akses pelayanan kepada siswa penerima

BSM, ini dikarenakan SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara menginginkan siswa-siswa tidak mampu dapat melaksanakan pendidikan dengan lancar tanpa harus terkendala dengan ekonomi orang tua siswa. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Winkel, (2006: 316-317) menjelaskan bahwa layanan informasi pendidikan adalah usaha untuk membekali para siswa dengan pengetahuan tentang data dan fakta dibidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan dan bidang perkembangan pribadi-sosial, supaya mereka dengan belajar tentang lingkungan hidupnya lebih mampu mengatur dan merencanakan kehidupannya sendiri.

Berbagai upaya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan pada SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara terus dilakukan, antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui program kelas layanan khusus (PKLK) untuk menanggulangi siswa miskin di daerah yang rentan mengalami putus sekolah. Dalam rangka mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun terutama untuk membantu masyarakat miskin agar dapat bersekolah di SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2012 SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara terus mengakomodir dan memfasilitas penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi siswa SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara.

Untuk mengurangi beban orang tua SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara juga menyediakan beasiswa bagi siswa-siswa miskin yang bersekolah di SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara. Penyediaan beasiswa ini dimaksudkan agar mereka tidak putus sekolah sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dan

berpeluang menempuh jenjang berikutnya.

Berdasarkan deskripsi di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari pemberian akses layanan pendidikan kepada siswa miskin dan rentang miskin adalah supaya para siswa memperoleh informasi layanan pendidikan yang relevan dalam rangka memilih dan mengambil keputusan secara tepat guna pencapaian pengembangan diri secara optimal serta membekali siswa dengan berbagai informasi tentang potensi diri sehingga siswa mampu meningkatkan pemahaman potensi diri guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Strategi dalam Mencegah Angka Putus Sekolah Bagi Siswa Miskin

Menurut Gunawan, (2010:71) menyatakan bahwa putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti, setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Menurut Mudjito, (2008:5) menyatakan bahwa masih banyaknya peserta didik mengalami putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Rendahnya kemampuan ekonomi termasuk eksploitasi tenaga anak sebagai pekerja anak oleh orang tuanya demi membantu mencari nafkah keluarga
2. rendahnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan

kurangnya dukungan motivasi dari keluarga.

Mencermati apa yang diungkapkan oleh Mudjito memberikan gambaran bahwa kondisi keluarga sangat mempengaruhi keberlanjutan sekolah anak, salah satunya adalah kondisi perekonomian keluarga. Hal senada juga diungkapkan oleh Saroni, (2011:148) bahwa, tingkat perekonomian keluarga pada kenyataannya merupakan salah satu aspek penghambat kesempatan proses pendidikan dan pembelajaran, ada banyak anak usia sekolah yang terhambat, bahkan kehilangan kesempatan mengikuti proses pendidikan hanya karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang mendukung.

Lebih lanjut Ahmad, (2011:134-135) menyatakan bahwa, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak mengalami putus sekolah yaitu:

1. Adat istiadat dan ajaran-ajaran tertentu
2. Karena kecilnya pendapatan orang tua murid
3. Jauhnya jarak antara rumah dan sekolah
4. Lemahnya kemampuan murid untuk meneruskan belajar dari satu kelas ke kelas selanjutnya
5. Kurang adanya perhatian dari pihak sekolah.

Persoalan putus sekolah di Provinsi Lampung cukup membuat kita miris data Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menyebutkan, ratusan ribu pelajar di Lampung dihantui putus sekolah. Angka yang disebut adalah 79.435 anak usia sekolah antara 6-18 tahun terancam putus sekolah mereka berasal dari keluarga miskin. Melihat tingginya angka putus sekolah tersebut maka SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara terus berupaya menggulirkan berbagai program strategis guna menekan angka pelajar

putus sekolah tersebut serendah mungkin. Paling tidak program tersebut ditujukan untuk mengupayakan anak usia sekolah di Lampung Utara mengecap pendidikan formal hingga lulus SMP atau menuntaskan wajib belajar sembilan tahun di antara program strategis yang digulirkan untuk mencegah pelajar putus sekolah adalah:

1. Mengurangi beban pengeluaran orang tua siswa

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari orang tua siswa, bahwa dengan adanya bantuan dana BSM dapat meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung, terutama iuran, walaupun terkadang masih ada iuran/pungutan yang diminta oleh pihak sekolah, tetapi frekuensinya minimal sekali. Pendidikan dasar merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia, sehingga mutu dan kualitasnya harus ditingkatkan karena pendidikan dasar menjadi dasar input ketika anak didik itu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sehingga dengan dana tersebut, tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya di pendidikan dasar karena para orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya pendidikan yang banyak pada setiap tahun ajaran baru untuk anak-anaknya yang akan bersekolah.

Berdasarkan uraian di atas nampak kaitan yang erat antara penggunaan dana BSM dengan indikator mutu pendidikan, sekolah yang mempunyai komitmen untuk memajukan pendidikan tingkat satuan sekolah diharapkan dapat memanfaatkan dana BSM untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan dan memenuhi kebutuhan sekolah siswa yang dibutuhkan, dengan demikian nampak pemanfaatan dana BSM bagi peningkatan kualitas siswa dan kebutuhan siswa untuk sekolah.

2. Mensinergikan kebijakan dan program bantuan siswa miskin (BSM)

Penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun, pemerintah, orang tua dan peserta didik juga mempunyai tanggung jawab terkait dengan biaya satuan pendidikan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 yang harus dipahami betul. Intinya adalah bagi pemerintah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah sampai terpenuhinya standar nasional pendidikan. Bagi siswa dan orang tua bertanggung jawab atas biaya pribadi siswa misalnya uang saku/uang jajan, seragam sekolah dan lain sebagainya, semua itu harus di pahami dan di persiapkan sedemikian rupa agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, dengan demikian, hal guru, siswa, sekolah dan orang tua dapat memahami bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada dalam buku pedoman pelaksanaannya.

Hasil penelitian diketahui bahwa program BSM yang diimplementasikan oleh SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah serta orang tua menerima dana BSM utuh tidak ada potongan sedikitpun dan semua diberikan rata sesuai dengan kebijakan pemerintah. Walaupun sekolah SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara sudah bisa melaksanakan kebijakan program BSM dengan optimal sesuai dengan kebijakan tetapi masih diperlukan adanya sinergisitas baik dari pemerintah, sekolah maupun orang tua peserta didik dengan adanya sinergisitas yang baik maka pelaksanaan

kebijakan program akan jauh lebih optimal ini dikarenakan masih ada beberapa guru dari SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara yang masih kurang memahami pelaksanaan program BSM tersebut sehingga mempengaruhi sinergitas sesama stakeholders.

Masyarakat khususnya keluarga miskin, tentu mengharapkan program strategis yang ditawarkan oleh SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara dapat terealisasi secara ideal karena dengan demikian Lampung Utara sudah melakukan investasi SDM minimal yang berpendidikan dasar. Proses belajar-mengajar juga harus menjadi perhatian menciptakan proses belajar-mengajar yang nyaman dan lancar bagi siswa miskin memang tidak mudah.

Harus dilihat realitas di lapangan apa adanya di daerah yang masyarakatnya miskin atau kurang pemahaman soal pentingnya pendidikan, pekerjaan menuntaskan wajib belajar tentu tidak mudah. Poin pentingnya adalah bagaimana menjadikan anak yang potensial terpinggirkan dari dunia sekolah menjadi terangkul dalam pendidikan bukan justru menjadikan potensi-potensi itu tambah terlempar, menjadi ketakutan sekolah dan memperbesar jumlah putus sekolah.

Cara dalam Memenuhi Kebutuhan Siswa Miskin dalam Pembelajaran

Cara dalam memenuhi kebutuhan siswa miskin dalam pembelajaran adalah dengan cara memberikan perhatian pada kegiatan belajar anak dan motivasi, bentuk perhatian orang tua yang tidak kalah pentingnya adalah memenuhi kelengkapan kebutuhan sekolah anak. Kebutuhan sekolah adalah segala alat dan sarana yang diperlukan untuk

menunjang kegiatan pendidikan anak. Kebutuhan tersebut bisa berupa ruang belajar anak, seragam sekolah, buku-buku, alat-alat belajar, dan lain-lain.

Menurut Walgito, (2012:3) cara memenuhi kebutuhan peserta didik adalah segala alat dan sarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar anak. Kebutuhan tersebut bisa berupa ruang belajar anak, seragam sekolah, buku-buku, alat-alat belajar, dan lain-lain. Belajar tidak akan berjalan dengan baik tanpa alat-alat belajar yang cukup hal ini berarti, salah satu penunjang keberhasilan pendidikan anak adalah didukung sarana sekolah yang memadai. Dengan adanya fasilitas sekolah yang memadai, maka anak menjadi termotivasi untuk ke sekolah, anak tidak merasa kesulitan dan bersemangat dalam melakukan kegiatan belajar karena semua fasilitas belajarnya telah tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan strategi dan cara untuk memenuhi kebutuhan siswa miskin di SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya adalah dengan beberapa hal, antara lain:

1. Pembelian buku dan alat tulis

Salah satu cara memenuhi kebutuhan sekolah siswa-siswa yang dianggap kurang mampu adalah dengan cara pembelian buku dan alat tulis, karena buku dan alat tulis merupakan kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi oleh siswa dalam proses pembelajaran, dengan terpenuhinya perlengkapan pembelajaran seperti buku dan alat tulis maka akan mempermudah siswa untuk belajar di kelas.

2. Pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah

Berdasarkan hasil observasi penelitian diketahui bahwa siswa yang menerima bantuan BSM juga menggunakan dana bantuan tersebut dengan membeli baju seragam ini

dikarenakan seragam sekolah merupakan perlengkapan sekolah yang sangat urgen dan harus dipenuhi oleh semua siswa baik yang mampu maupun yang tidak mampu, fakta empiris diketahui bahwa siswa yang tidak mampu membeli baju seragam hanya sekali dalam 2 tahun ataupun tidak sama sekali asalkan baju yang digunakan masih layak dan muat maka siswa yang tidak mampu terus menggunakan seragam tersebut, sedangkan dana BSM digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Pembiayaan transportasi ke sekolah

Biaya transportasi merupakan biaya yang juga harus terpenuhi oleh siswa ini dikarenakan jauhnya akses pendidikan yang ditempuh oleh siswa, bagi siswa yang tidak mampu tentu ini menjadi beban karena pengeluaran akan semakin besar ketika dalam menempuh pendidikan harus naik angkutan umum sedangkan penghasilan dari orang tua hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebutlah maka dana BSM juga bisa untuk digunakan sebagai pembiayaan transportasi. Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa rata-rata siswa di SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara tidak memerlukan pembiayaan yang besar untuk pergi ke sekolah ini dikarenakan akses antara rumah dan sekolah cukup dekat selain itu juga banyak yang dari orang tua mengantar anaknya untuk pergi ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor.

Kendala-Kendala dalam Mengimplementasikan BSM

Menurut Iskandar, (2008:668) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan rendahnya peran serta masyarakat khususnya orang tua pada penyelenggaraan pendidikan. *Pertama*, adalah kurangnya kesadaran

orang tua akan kewajiban mereka untuk menyelenggarakan pendidikan. *Kedua*, rasa ketidaktahuan orang tua berkaitan dengan bentuk partisipasi yang bisa mereka berikan. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Siskandar ini dapat diketahui bahwa, ketidaksadaran dan kurangnya pengetahuan orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anaknya, menyebabkan kurangnya perhatian pada pendidikan anak.

Ketidaksadaran dan kurangnya pengetahuan orang tua akan pentingnya pendidikan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua. Menurut Schneider dan Coleman, (dalam Santrock, 2008:532) orang tua dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mungkin percaya bahwa keterlibatan mereka dalam pendidikan anak adalah penting mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak dan memberi stimuli intelektual di rumah.

Lebih lanjut menurut Idris, (2011:180) keadaan sosial ekonomi keluarga memiliki peranan krusial terhadap proses perkembangan anak-anak, anak memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan pengetahuan dan beragam kecakapan atas jaminan dan dukungan ekonomi orang tua untuk memungkinkan terjaganya hubungan orang tua dan anak-anaknya, karena orang tua akan lebih fokus perhatiannya kepada anak-anak dan perkembangannya.

Berdasarkan uraian diskripsi menurut para ahli tersebut maka pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tidak selalu berjalan dengan mudah, sebagai program pemerintah yang sebenarnya sangat populer, program BSM mendapat berbagai respon, dari berbagai pihak dan dari berbagai sudut pandang.

Dana BSM tidak diberikan kepada sekolah, melainkan kepada

siswa, adapun beberapa kendala yang dihadapi pada waktu pelaksanaan kebijakan program BSM tersebut adalah sebagai berikut:

1. Minimnya dana BSM yang diberikan pemerintah ke sekolah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dana BSM yang diberikan untuk siswa miskin dan rentang miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka untuk keperluan sekolah, sehingga perlu dilakukan kajian ulang supaya dana BSM yang akan disalurkan selanjutnya bisa memenuhi semua kebutuhan siswa-siswa yang tidak mampu serta pelaksanaan jauh lebih optimal dan efektif sehingga program BSM bisa dirasakan oleh siswa miskin dan rentang miskin sehingga mereka bisa tetap melanjutkan sekolah sesuai dengan program kebijakan dari pemerintah yang mewajibkan pendidikan sembilan tahun.

2. Pencairan dana BSM tidak tepat waktu

Pencairan dana BSM sering terlambat atau tidak tepat waktu, sesuai dengan ketentuan pencairan dana BSM tiap triwulan dan pencairan dapat dicairkan pada awal bulan triwulan, tapi yang terjadi untuk dana BSM tahun 2014. Pencairan dilakukan 2 tahap yaitu tahap pertama bulan Juli 2014 dan tahap kedua November 2014. Hal ini menjadi masalah bagi sekolah karena akan mengganggu kelancaran kebutuhan siswa yang tidak bisa di tunda sehingga akan berdampak kepada pelaksana kegiatan belajar mengajar, padahal siswa dituntut untuk bisa optimal mengikuti kegiatan belajar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh penulis diketahui bahwa keterlambatan dalam pencairan dana disebabkan dengan adanya pembuatan RAPBN dan APBNP oleh pemerintah yang di buat pada awal tahun dan pertengahan tahun oleh sebab itu maka

pihak sekolah harus pandai-pandai berfikir bagaimana yang harus dilakukan agar semua kebutuhan siswa miskin dan rentang miskin bisa berjalan dengan lancar yaitu salah satunya harus mencari dana talangan terlebih dahulu, padahal pada kenyataannya kadang dana yang di pinjam itu lebih besar daripada dana yang keluar dari pemerintah, berdasarkan hal tersebut orang tua siswa menduga pencairan dana BSM didistribusikan dengan tepat waktu.

3. Kurang pahamnya orang tua siswa dalam pengelolaan dana BSM

Pandangan masyarakat terhadap kebijakan bantuan dana BSM dari pemerintah ini pada awalnya sangat senang sekali karena membantu seluruh biaya pendidikan, baik operasional maupun non operasional atau pribadi jadi mereka menganggap bahwa dengan adanya bantuan BSM, orang tua sudah tidak membayar semua keperluan di dalam pendidikan anaknya sampai dengan keperluan pribadi siswa seperti seragam sekolah bahkan ada orang tua siswa yang menggunakan dana BSM untuk keperluan sehari-hari.

Kurang pahamnya orang tua terhadap program BSM dikarenakan minimnya sosialisasi kepada orang tua yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah, dikatakan minim karena sekolah yang diteliti mengakui mereka hanya melakukan sosialisasi hanya kepada komite sekolah, adapaun sosialisasi tersebut diadakan oleh dinas pendidikan bukan sekolah. Sekali lagi hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki sekolah untuk mengadakan sosialisasi.

Berdasarkan hal tersebut maka banyak dari orang tua yang banyak kurang paham tentang program BSM, tujuan BSM dan kegunaan BSM sehingga banyak orang tua siswa yang menggunakan dana BSM untuk keperluan sehari-hari bukan untuk

kebutuhan siswa untuk keperluan sekolah, ini menjadi bahan evaluasi semua pihak agar lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada orang tua dengan tujuan dana BSM dapat digunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sekolah anak-anaknya.

Pengelolaan Dana BSM oleh Orang Tua dan Siswa

Pengelolaan dana/keuangan pendidikan diharapkan dapat menjadi alat penjamin terpenuhinya kebutuhan dana bagi dunia pendidikan, tersedianya dana sangatlah penting karena dalam mengembangkan dunia pendidikan masalah pendanaan merupakan salah satu bagian yang mendukung keberhasilan dalam mengembangkan dunia pendidikan. Tersedianya dana dapat mendukung berbagai program yang akan dijalankan sehingga proses perbaikan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dapat berlangsung sesuai dengan yang diinginkan.

Definisi pengelolaan dana/keuangan pendidikan adalah suatu usaha dan kegiatan pengaturan uang yang meliputi kegiatan perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfaatan dana, pembukuan, penyimpanan, pemeriksaan dan pengawasan, pertanggung jawaban dan pelaporan uang yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan menurut Herabudin, (2009:11) definisi pengelolaan dana/keuangan pendidikan adalah proses melaksanakan seluruh aktivitas keuangan yang berkaitan dengan bidang-bidang kependidikan yang didalamnya melibatkan kerjasama seluruh personal dan adanya kinerja sesuai dengan tugas dan kedudukannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana/keuangan pendidikan adalah

proses melaksanakan seluruh aktivitas keuangan yang berkaitan dengan bidang-bidang kependidikan yang meliputi kegiatan seperti perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfaatan dana, pembukuan, penyimpanan, pemeriksaan dan pengawasan, pertanggung jawaban dan pelaporan uang yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa dana BSM tidak sepenuhnya digunakan oleh siswa untuk kebutuhan sekolah melainkan banyak digunakan untuk kebutuhan orang tuanya sendiri, berdasarkan hal tersebut ternyata orang tua siswa masih banyak yang kurang paham tentang pengelolaan dana BSM tersebut, sekolah diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pemantauan secara intensif tentang pengelolaan dan penggunaan dana BSM dengan tujuan dana BSM dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh siswa dan benar-benar untuk kebutuhan sekolah.

Proses pengambilan dana BSM, pihak sekolah sebelumnya memberikan nomor rekening bank atas nama siswa itu sendiri yang bersangkutan untuk mentrasfer dana BSM tersebut dan pengambilan dana dilakukan oleh siswa itu sendiri yang didampingi oleh orang tua siswa.

Pengelolaan dana BSM sepenuhnya dikelola oleh orang tua siswa bukan sekolah ini dikarenakan dana BSM ditunjukkan untuk siswa bukan untuk sekolah, berdasarkan hasil observasi penelitian diketahui bahwa pengelolaan dana oleh orang tua serta tidak melibatkan anaknya dalam melakukan pengelolaan maka anak cenderung apatis dalam pengelolaan dana BSM tersebut anak cenderung tidak mau tahu apakah dana tersebut di simpan untuk kebutuhan sekolah

selanjutnya ataukah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi ketika anak dilibatkan atau bahkan anak di suruh untuk mengelola dana BSM sendiri maka anak akan lebih tahu cara yang benar dalam mengelola keuangannya sendiri serta akan membelanjakan sesuai kebutuhan dia sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Akses pelayanan pendidikan bagi siswa miskin di SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara selalu berusaha memberikan informasi dan akses pelayanan kepada siswa penerima BSM, ini dikarenakan SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara menginginkan siswa-siswa tidak mampu dapat melaksanakan pendidikan dengan lancar tanpa harus terkendala dengan ekonomi orang tua siswa
2. Strategi dalam mencegah angka putus sekolah bagi siswa miskin yang dilakukan oleh SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara sudah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi yang dilakukan untuk mencegah angka putus sekolah bagi siswa miskin di Lampung Utara adalah sebagai berikut:
 - a. Mengurangi beban pengeluaran orang tua siswa

SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara melakukan subsidi silang yang bertujuan memberikan keringanan biaya kepada siswa yang kurang mampu serta ada beberapa biaya yang ditanggung oleh sekolah.

b. Mensinergikan kebijakan dan program bantuan siswa miskin (BSM)

Pelaksanaan kebijakan program BSM SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara mengoptimalkan sinergitas baik dari pemerintah, sekolah maupun orang tua peserta didik ini dikarenakan dengan adanya sinergitas yang baik maka pelaksanaan kebijakan program akan jauh lebih optimal ini dikarenakan masih ada beberapa guru dari SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara yang masih kurang memahami pelaksanaan program BSM tersebut sehingga mempengaruhi sinergitas sesama stakeholders.

3. Berdasarkan hasil penelitian strategi dan cara untuk memenuhi kebutuhan siswa miskin di SMP Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya adalah dengan beberapa hal, antara lain:
 - a. Pembelian buku dan alat tulis
Cara ini dilakukan karena buku dan alat tulis merupakan kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi oleh siswa dalam proses pembelajaran, dengan terpenuhinya perlengkapan pembelajaran seperti buku dan alat tulis maka akan mempermudah siswa untuk belajar di kelas.
 - b. Pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah
Langkah ini dilakukan dikarenakan seragam sekolah merupakan perlengkapan sekolah yang sangat urgen dan harus

dipenuhi oleh semua siswa baik yang mampu maupun yang tidak mampu, fakta empiris diketahui bahwa siswa yang tidak mampu membeli baju seragam hanya sekali dalam 2 tahun ataupun tidak sama sekali asalkan baju yang digunakan masih layak dan muat maka siswa yang tidak mampu terus menggunakan seragam tersebut, sedangkan dana BSM digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

c. Pembiayaan transportasi ke sekolah

Biaya transportasi merupakan biaya yang juga harus terpenuhi oleh siswa ini dikarenakan jauhnya akses pendidikan yang ditempuh oleh siswa, bagi siswa yang tidak mampu tentu ini menjadi beban karena pengeluaran akan semakin besar ketika dalam menempuh pendidikan harus naik angkutan umum sedangkan penghasilan dari orang tua hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

4. Adapun beberapa kendala yang dihadapi pada waktu pelaksanaan kebijakan program BSM tersebut adalah sebagai berikut:

a. Minimnya dana BSM yang diberikan pemerintah ke sekolah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dana BSM yang diberikan untuk siswa miskin dan rentang miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka untuk keperluan sekolah, sehingga perlu dilakukan kajian ulang supaya dana BSM yang akan disalurkan selanjutnya bisa memenuhi semua kebutuhan siswa-siswa yang tidak mampu serta pelaksanaan jauh lebih optimal dan efektif sehingga program BSM bisa dirasakan oleh siswa miskin dan rentang miskin sehingga mereka bisa tetap melanjutkan sekolah sesuai dengan program kebijakan dari pemerintah yang

mewajibkan pendidikan sembilan tahun.

b. Pencairan dana BSM tidak tepat waktu

Keterlambatan pencairan dana yaitu kurangnya kepastian tanggal atau waktu penyaluran dana tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan sekali yang mengakibatkan proses pemenuhan kebutuhan siswa untuk pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan operasional siswa dalam proses pembelajaran tersebut.

c. Kurang pahamnya orang tua siswa dalam pengelolaan dana BSM

Kurang pahamnya orang tua terhadap program BSM dikarenakan minimnya sosialisasi kepada orang tua yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah, dikatakan minim karena sekolah yang diteliti mengakui mereka hanya melakukan sosialisasi hanya kepada komite sekolah, adapaun sosialisasi tersebut diadakan oleh dinas pendidikan bukan sekolah.

Pengelolaan dana BSM sepenuhnya dikelola oleh orang tua siswa bukan sekolah ini dikarenakan dana BSM ditunjukkan untuk siswa bukan untuk sekolah, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan dana oleh orang tua serta tidak melibatkan anaknya dalam melakukan pengelolaan maka anak cenderung apatis dalam pengelolaan dana BSM tersebut anak cenderung tidak mau tahu apakah dana tersebut di simpan untuk kebutuhan sekolah selanjutnya ataukah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi ketika anak dilibatkan ataubahkan anak di suruh untuk mengelola dana BSM sendiri

maka anak akan lebih tahu cara yang benar dalam mengelola keuangannya sendiri serta akan membelanjakan sesuai kebutuhan dia sendiri.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan, maka peneliti mengajukan beberapa saran mengenai implementasi kebijakan program BSM sebagai berikut:

1. Bagi pihak sekolah

Pihak sekolah hendaknya selalumen berikan sosialisasi kepada wali murid dan seluruh siswa mengenai pelaksanaan kebijakan program BSM ini supaya tidak adanya anggapan-anggapan yang salah daro wali murid.

2. Bagi pihak guru

Bagi guru hendaknya selalu memberikan motivasi kepada siswa bahwa dengan adanya program

BSM maka mereka harus lebih semangat untuk belajar karena sudah tidak terbebani dengan masalah biaya.

3. Bagi pihak pemerintah

a. Pemerintah supaya lebih cepat dalam penyusunan anggaran sehingga pencairan dana dapat datang tepat waktu sehingga pihak sekolah tidak perlu harus mencari dana talangan dulu untuk membiayai keperluan siswa yang tidak mampu

b. Pemerintah hendaknya memberikan tambahan dana yang ditujukan khusus untuk program BSM dengan tujuan siswa-siswa yang tidak mampu juga mendapatkan semua dana BSM dikarenakan masih banyak siswa yang kurang mampu belum mendapatkan bantaun BSM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. Sadirman. 2011. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Agustino, Leo. 2008. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: IAAPI
- Danim. S. 2003. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gunawan, A., 2010. *Perbandingan Efek Analgesik antara Parasetamol dengan kombinasi Parasetamol dan Kafein pada Mencit*. (Online)Available from: <http://eprints.ums.ac.id>. Diakses pada Tanggal 04 Januari 2015.
- Hancock, John, De Chiara, Joseph and Callender. 2006. *Time Saver Standarts for Building Types 2nd edition*. New York: Mc Graw Hill Book Company.
- Herabudin. 2009. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Idris, Zahara dan Lisman Jamal. 2011. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Grasindo

- Iskandar, Irfan M. 2008. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mudjito AK. 2008. *Kebijakan direktorat pembinaan TK dan SD*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menengah Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar
- Patton, Michael, Quinn. 2006. *Qualitative Evaluation Methods*. Biverly Hills: Sage Publication
- Prayitno dan Amti. 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Informasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Purwoko, Budi. 2008. *Organisasi dan Managemen Pelayanan Infomasi Pendidikan*. Surabaya: Unesa University Press, Surabaya.
- Saroni, M. 2011. *Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: AR-RUZZ
- Santrock, John W. 2008. *Adolescence, Perkembangan Remaja. Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga
- Suharno, Edi. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Walgito, Bimo. 2012. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winkel dan Sri Hastuti. 2006. *Bimbingan dan Informasi pendidikan di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi